CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 5 No.2
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

TRANSFORMASI DIGITAL-SOCIAL DALAM *COMMUNITY RELATIONS*: MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA BERBASIS KEMANDIRIAN ENERGI PADA BUMN SEKTOR TEKNOLOGI DAN ENERGI

Roficho Tullailiyah[1], Jovis Arwi Sagita[2], Aprelia Silfiana Putri[3] , Naufal Athiya Primananda[4]
[1,2,3,4]Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
Email: piko8maret@gmail.com

Abstrak: *Di tengah dorongan global terhadap standar Environmental, Social, and Governance (ESG), peran Public Relations (PR) dalam State-Owned Enterprises (SOEs) di sektor energi telah mengalami pergeseran paradigma dari sekadar membangun citra menjadi menciptakan dampak sosial yang nyata. Meskipun pembangunan infrastruktur energi terbarukan berkembang secara masif, banyak program kemandirian ekonomi pedesaan gagal akibat dominannya pendekatan teknokratis yang mengabaikan dimensi komunikasi relasional. Artikel konseptual ini bertujuan untuk merumuskan model Community Relations baru yang mengintegrasikan strategi komunikasi dialogis dengan platform pemantauan digital sebagai prasyarat keberlanjutan program energi dan kemandirian ekonomi di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur konseptual dengan mensintesis teori Relationship Management, konsep Creating Shared Value (CSV), dan teori Diffusion of Innovations. Artikel ini mengusulkan model "Technological-Social Symbiosis" sebagai kerangka kerja baru. Dua proposisi utama diajukan, yaitu: (1) strategi komunikasi dialogis secara signifikan meningkatkan tingkat adopsi teknologi energi terbarukan dibandingkan komunikasi satu arah; dan (2) integrasi platform pemantauan digital berfungsi sebagai instrumen transparansi yang memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjamin keberlanjutan ekonomi melampaui fase seremonial proyek. Model yang diusulkan memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur PR Digital dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, artikel ini menyediakan panduan strategis bagi SOEs di sektor energi dan teknologi untuk membangun Social License to Operate yang kuat melalui kolaborasi yang inklusif dan lintas sektor.*

Kata Kunci: *Community Relations, SOEs, Kemandirian Energi Pedesaan, Komunikasi Dialogis, Pemantauan Digital, Social License to Operate.*

PENDAHULUAN

Pergeseran fundamental dalam paradigma *Public Relations* (PR) di sektor industri energi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2026 telah diamati sebagai transisi dari sekadar pembangunan citra (*image building*) menuju penciptaan dampak sosial yang terukur (*social impact*). Strategi komunikasi korporat tidak lagi diposisikan sebagai instrumen kosmetik untuk menutupi dampak operasional, melainkan diintegrasikan sebagai bagian inti dari keberlanjutan bisnis melalui pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Fenomena ini diperkuat oleh tuntutan global terhadap transparansi radikal, di mana legitimasi perusahaan energi kini sangat bergantung pada kemampuan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

mereka dalam memberdayakan komunitas lokal, seperti yang terlihat dalam inisiatif kemandirian energi desa yang dilakukan oleh berbagai BUMN energi di Indonesia (Laporan Tahunan ESG BUMN, 2025). Komunikasi dialogis secara konsisten diterapkan untuk memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput. Integrasi teknologi digital dalam program hubungan masyarakat (*community relations*) telah dipandang sebagai katalisator utama bagi tercapainya dampak sosial yang lebih presisi dan akuntabel. Melalui pemanfaatan platform monitoring digital, setiap progres pemberdayaan ekonomi berbasis energi di wilayah pedesaan dapat dipantau secara langsung oleh para pemangku kepentingan, sehingga risiko kegagalan program akibat ketidaksesuaian budaya dapat diminimalisasi. Paradigma baru ini mengonstruksi peran praktisi PR bukan hanya sebagai komunikator informasi, melainkan sebagai fasilitator transformasi sosial yang menghubungkan inovasi teknologi perusahaan dengan kebutuhan riil masyarakat (Siregar & Pratama, 2024). Dengan demikian, keberhasilan hubungan masyarakat di masa depan diukur melalui seberapa besar kemandirian ekonomi yang mampu diciptakan, bukan lagi sekadar volume publikasi positif di media massa.

Kegagalan sistemik dalam berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di sektor energi sering kali diidentifikasi sebagai akibat dari dominasi pendekatan teknokratis yang mengabaikan dimensi komunikasi relasional. Meskipun infrastruktur energi terbarukan telah diimplementasikan secara masif di wilayah pedesaan, keberlanjutan fungsionalnya ditemukan sering terhenti hanya beberapa bulan setelah fase serah terima dilakukan. Fenomena ini dipicu oleh kurangnya keterlibatan emosional dan kognitif masyarakat lokal, di mana komunikasi perusahaan cenderung bersifat instruksional dan searah dibandingkan dialogis. Berdasarkan data evaluasi sektor energi, ditemukan bahwa sekitar 30% proyek energi berbasis komunitas mengalami kerusakan permanen atau pengabaian oleh warga setempat karena tidak adanya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang seharusnya dibangun melalui strategi *Community Relations* yang inklusif (Wicaksono, 2024). Oleh karena itu, kesenjangan konseptual ditemukan pada minimnya integrasi antara keahlian teknis engineering dengan kompetensi komunikasi relasional dalam manajemen program BUMN. Ketidakmampuan praktisi hubungan masyarakat dalam menerjemahkan inovasi teknologi menjadi nilai-nilai sosial yang relevan bagi masyarakat pedesaan telah mengakibatkan munculnya resistensi tersembunyi atau apatisme sosial. Paradigma pembangunan yang bersifat *top-down* masih ditemukan mendominasi kebijakan perusahaan,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

di mana masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, bukan sebagai mitra strategis dalam transisi energi. Kesenjangan ini diperparah oleh ketiadaan model komunikasi yang mampu menjembatani kompleksitas teknis energi dengan kearifan lokal serta kebutuhan ekonomi rill desa. Jika dimensi relasional terus diabaikan, maka investasi besar yang dialokasikan oleh BUMN untuk kemandirian energi diprediksi hanya akan menghasilkan artefak teknologi yang tidak memberikan dampak transformatif terhadap kesejahteraan komunitas (Rahmawati & Hakim, 2025). Masalah ini menuntut adanya rekonseptualisasi peran PR agar tidak hanya terfokus pada pelaporan seremonial, tetapi pada pendampingan relasional yang berkelanjutan.

Penyusunan artikel konseptual ini ditujukan untuk merumuskan sebuah model komunikasi komunitas baru yang mengintegrasikan dimensi teknologi digital dengan keterlibatan sosial dalam program kemandirian energi BUMN. Melalui analisis kritis terhadap kegagalan model konvensional, struktur baru yang bersifat dialogis dan partisipatif diusulkan sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi teknis perusahaan dan penerimaan sosial masyarakat perdesaan. Tujuan utama dipusatkan pada identifikasi elemen-elemen strategis dalam *Community Relations* yang mampu mentransformasi peran masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi pengelola energi yang mandiri. Hal ini sejalan dengan tuntutan peta jalan keberlanjutan BUMN 2026 yang menekankan pada penciptaan nilai bersama (*Creating Shared Value*) sebagai indikator utama keberhasilan hubungan masyarakat (Laporan Strategis BUMN, 2026). Lebih lanjut, artikel ini dikembangkan untuk menyediakan kerangka kerja teoretis bagi praktisi PR di sektor energi dalam mengelola dinamika sosial yang kompleks di tingkat lokal. Proposisi mengenai pentingnya sinergi antara komunikasi relasional dan platform pemantauan digital diajukan guna memastikan transparansi serta keberlanjutan ekonomi desa secara jangka panjang. Dengan dirumuskannya model ini, diharapkan kontribusi teoretis terhadap literatur manajemen hubungan masyarakat dapat diberikan, khususnya dalam konteks kedaulatan energi di negara berkembang. Upaya penataan kembali strategi *community engagement* ini diletakkan sebagai fondasi untuk mencapai legitimasi sosial yang lebih kokoh bagi perusahaan energi nasional (Hidayat & Kusuma, 2025).

Nilai kebaruan dari artikel ini terletak pada sintesis teoretis antara peran infrastruktur digital dari BUMN Teknologi (Telkom) dan ketersediaan sumber daya dari BUMN Energi dalam bingkai *Community Relations*. Keaslian pemikiran ini ditunjukkan melalui proposisi bahwa kemandirian energi desa tidak lagi dapat dikelola secara terisolasi sebagai isu teknis

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

energi semata, melainkan harus diintegrasikan dengan konektivitas digital untuk menjamin transparansi data dan akuntabilitas sosial. Integrasi lintas sektoral ini dibahas secara mendalam untuk mengisi kekosongan literatur mengenai *inter-organizational collaboration* dalam praktik hubungan masyarakat di negara berkembang. Melalui penggabungan dua kekuatan BUMN tersebut, sebuah model "Simbiosis Teknologis-Sosial" dikonstruksi untuk menjelaskan bagaimana pengawasan berbasis digital dapat memperkuat ikatan kepercayaan (*trust*) antara korporasi dan komunitas lokal (Mulyana & Wijaya, 2025). Pentingnya pembahasan ini secara teoretis didasarkan pada kebutuhan untuk mendefinisikan ulang batas-batas tanggung jawab sosial korporat di era industri 5.0. Penekanan diberikan pada bagaimana kolaborasi antara penyedia teknologi dan produsen energi dapat menciptakan ekosistem ekonomi sirkular di pedesaan yang lebih tangguh terhadap fluktuasi ekonomi global. Kontribusi signifikan diberikan dengan menawarkan perspektif baru bahwa *Community Relations* yang efektif pada tahun 2026 harus mampu mengelola data komunitas secara *real-time* guna memitigasi risiko kegagalan program sejak dini. Dengan demikian, nilai strategis dari penelitian konseptual ini ditemukan pada kemampuannya untuk mengonseptualisasikan peran teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai fondasi baru bagi dialog sosial yang berkelanjutan (Fauzi, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

a. Evolution of Community Relations

Evolusi praktik *Community Relations* telah diidentifikasi melalui transisi signifikan dari model informasi publik (*public information*) yang bersifat searah menuju model komunikasi simetris dua arah (*two-way symmetrical communication*). Pada fase awal, hubungan masyarakat diposisikan hanya sebagai instrumen diseminasi data teknis dari korporasi kepada publik tanpa adanya mekanisme umpan balik yang terstruktur. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas isu sosial di sektor energi, model tersebut ditemukan tidak lagi memadai untuk memitigasi konflik kepentingan di tingkat lokal. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas, di mana suara komunitas mulai ditempatkan sebagai elemen determinan dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam konteks BUMN, model simetris diaplikasikan untuk membangun kesepahaman bersama (*mutual understanding*) sehingga program kemandirian energi tidak lagi dianggap sebagai paksaan teknokratis, melainkan sebagai kebutuhan kolektif yang disepakati (Utomo &

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Sari, 2024). Penerapan komunikasi simetris dalam hubungan masyarakat modern dipandang sebagai fondasi utama bagi tercapainya kedaulatan ekonomi di wilayah pedesaan. Melalui model ini, dialog yang setara antara manajemen BUMN dan aktor lokal difasilitasi untuk mengidentifikasi potensi hambatan sosial sebelum sebuah inovasi teknologi diimplementasikan. Perubahan paradigma ini memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih organik dan berkelanjutan, di mana keberhasilan program tidak lagi diukur secara kuantitatif melalui jumlah infrastruktur yang dibangun, melainkan secara kualitatif melalui tingkat kepercayaan komunitas. Integrasi antara teori sistem dan manajemen hubungan dalam PR digunakan untuk menjelaskan bahwa perusahaan energi tidak dapat beroperasi secara terisolasi, melainkan harus berfungsi sebagai bagian integral dari ekosistem sosial masyarakat (Bakti & Ramadhan, 2025). Dengan demikian, evolusi teoretis ini memberikan landasan bagi praktisi untuk mengadopsi peran sebagai fasilitator pemberdayaan, bukan sekadar penyampai pesan korporat.

b. *Creating Shared Value (CSV) in SOEs*

Konsep *Creating Shared Value* (CSV) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipahami sebagai strategi fundamental untuk menyeimbangkan pencapaian laba komersial dengan pemenuhan tujuan sosial (*social purpose*). Berbeda dengan model CSR konvensional yang sering kali diposisikan sebagai biaya tambahan, CSV diintegrasikan langsung ke dalam rantai nilai perusahaan untuk menjawab tantangan kemasyarakatan melalui model bisnis yang berkelanjutan. Dalam operasional BUMN sektor energi, kemandirian ekonomi desa dikonstruksi bukan sekadar sebagai target filantropi, melainkan sebagai upaya penguatan ekosistem pasar dan mitigasi risiko sosial di wilayah operasional. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya nilai ekonomi bagi perusahaan melalui efisiensi sumber daya dan inovasi, sementara secara simultan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi komunitas lokal melalui penyediaan energi murah dan produktif (Prasetio & Nugroho, 2025). Implementasi CSV dalam struktur BUMN di Indonesia secara teoretis diletakkan pada kemampuan perusahaan untuk melakukan redefinisi produktivitas dalam rantai nilai. Pengalokasian modal untuk teknologi energi terbarukan di tingkat desa dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu mereduksi ketergantungan pada subsidi energi fosil, sekaligus menumbuhkan sektor UMKM berbasis komunitas. Tantangan dalam menyeimbangkan profitabilitas dan dampak sosial dijawab melalui transparansi pelaporan yang tidak hanya mengukur

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

metrik finansial, tetapi juga keberlanjutan dampak sosial yang dihasilkan bagi masyarakat (*social return on investment*). Melalui sinergi lintas sektoral, keberhasilan BUMN dalam menerapkan CSV dinilai dari kemampuannya untuk mengonversi masalah komunitas menjadi peluang bisnis yang saling menguntungkan secara strategis (Wardani, 2024). Hal ini mempertegas bahwa keberadaan BUMN di era modern tidak lagi dinilai berdasarkan dividen finansial semata, melainkan pada kontribusinya terhadap ketahanan nasional dan kesejahteraan publik.

c. *Digital-Social Symbiosis*

Konsep simbiosis digital-sosial dalam kerangka hubungan masyarakat dipahami sebagai penggabungan antara infrastruktur teknologi informasi dan interaksi sosial organik untuk mempercepat difusi inovasi di wilayah perdesaan. Dalam konteks ini, teknologi digital tidak hanya diposisikan sebagai saluran komunikasi pasif, melainkan sebagai mesin penggerak yang memfasilitasi dialog partisipatif antara korporasi dan komunitas lokal secara *real-time*. Pemanfaatan platform *Digital PR* oleh BUMN teknologi dan energi memungkinkan data teknis mengenai kemandirian energi dikonversi menjadi narasi sosial yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam. Melalui mekanisme ini, hambatan geografis dan kesenjangan informasi yang selama ini menghalangi adopsi teknologi terbarukan di pedalaman dapat diminimalisasi melalui transparansi data yang disediakan oleh platform digital terintegrasi (Suryanto & Arifin, 2025). Lebih lanjut, percepatan adopsi inovasi di tingkat desa ditemukan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan digital yang dibangun melalui pendampingan sosial secara berkelanjutan. Paradigma *Digital PR* diaplikasikan untuk menciptakan ekosistem komunikasi yang inklusif, di mana platform monitoring energi juga berfungsi sebagai ruang diskusi bagi warga untuk menyampaikan umpan balik langsung terkait operasional infrastruktur. Simbiosis ini dikonstruksi melalui integrasi literasi digital ke dalam program pemberdayaan ekonomi, sehingga teknologi yang dibawa oleh BUMN tidak lagi dipandang sebagai entitas asing, melainkan sebagai aset komunitas yang harus dijaga. Secara teoretis, hubungan timbal balik antara kemajuan digital dan penguatan modal sosial ini diletakkan sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan program kemandirian ekonomi desa di era transformasi industri 5.0 (Putri & Zulkarnain, 2024).

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

d. The Link between Energy & Economy

Korelasi antara ketersediaan energi dan pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai hubungan kausalitas di mana akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan diletakkan sebagai prasyarat fundamental bagi produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal. Secara teoretis, kemandirian energi di tingkat desa dipandang sebagai instrumen untuk mereduksi biaya input produksi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan daya. Ketika beban biaya energi dapat ditekan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang dikelola secara mandiri, surplus ekonomi yang dihasilkan ditemukan dapat dialokasikan kembali untuk penguatan modal usaha dan diversifikasi produk. Oleh karena itu, kedaulatan energi perdesaan tidak hanya dikonstruksi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan sebagai mesin penggerak transformasi ekonomi yang membebaskan komunitas dari kerentanan fluktuasi harga energi global (Santoso & Kurniawan, 2025). Integrasi infrastruktur energi mandiri ke dalam ekosistem ekonomi desa ditemukan secara signifikan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal melalui proses mekanisasi dan digitalisasi yang stabil. Paradigma "Energy-Economy Nexus" digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap peningkatan aksesibilitas energi akan diikuti oleh peningkatan efisiensi operasional dan penciptaan lapangan kerja baru di tingkat akar rumput. Dalam kerangka kerja BUMN, penyediaan energi berbasis komunitas diaplikasikan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang tidak lagi bergantung pada intervensi fiskal pemerintah secara terus-menerus. Keberlanjutan ekonomi desa secara teoretis diletakkan pada kemampuan komunitas untuk mengelola sumber daya energinya sendiri, yang pada gilirannya akan memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi nasional secara agregat (Pratama, 2024). Dengan demikian, penyediaan energi yang inklusif dipandang sebagai katalisator utama bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

Conceptual Framework / Proposed Model

Konstruksi model hubungan masyarakat berbasis energi diidentifikasi melalui tiga pilar utama yang saling berinterdependensi, yaitu edukasi berkelanjutan, penguasaan teknologi, dan pendampingan sosial intensif. Edukasi diposisikan sebagai fondasi awal untuk mentransformasi persepsi komunitas terhadap inovasi energi terbarukan, sehingga resistensi yang muncul akibat ketidaktahuan dapat dimitigasi sejak fase inisiasi. Pilar teknologi, dalam kerangka kerja BUMN, diaplikasikan bukan sekadar sebagai penyediaan infrastruktur fisik,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

melainkan sebagai instrumen digital yang memungkinkan masyarakat melakukan pemantauan kinerja energi secara mandiri dan transparan. Sementara itu, pilar pendampingan diletakkan sebagai jembatan relasional yang memastikan adanya transfer pengetahuan dan keterampilan teknis secara organik, sehingga keberlanjutan program tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kehadiran teknisi eksternal perusahaan (Sudirman & Hakim, 2025). Sinergi di antara ketiga pilar tersebut dikonsepkan untuk menciptakan ekosistem hubungan masyarakat yang resilien dalam menghadapi dinamika sosial di pedesaan. Integrasi elemen edukasi dan teknologi ditemukan dapat mempercepat proses literasi digital masyarakat, yang pada gilirannya akan mempermudah implementasi platform monitoring digital yang dikelola oleh klaster BUMN Teknologi. Pendampingan sosial yang bersifat partisipatif diaplikasikan untuk memastikan bahwa setiap hambatan teknis yang dihadapi oleh warga dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui mekanisme dialog simetris. Melalui penguatan ketiga pilar ini, tujuan strategis BUMN untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa berbasis energi dapat dicapai secara efektif, sekaligus memperkokoh legitimasi sosial perusahaan sebagai mitra pembangunan yang kredibel (Lestari & Wijaya, 2024).

Perolehan *Social License to Operate* (SLO) atau izin sosial untuk beroperasi diidentifikasi sebagai hasil dari keberhasilan BUMN dalam mengonversi proyek energi terbarukan menjadi instrumen legitimasi sosial yang kuat. Energi hijau tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban ekologi, melainkan dikonstruksi sebagai alat diplomasi korporat untuk memitigasi resistensi masyarakat yang sering muncul pada proyek energi konvensional. Melalui penyediaan akses energi bersih yang dikelola secara komunal, kepercayaan publik ditemukan dapat ditingkatkan karena manfaat operasional perusahaan dirasakan secara langsung oleh ekosistem lokal. Legitimasi ini diperoleh bukan melalui paksaan legal, melainkan melalui pengakuan masyarakat terhadap integritas BUMN dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi akar rumput (Hidayat & Pratama, 2025). Proses pembangunan izin sosial melalui energi terbarukan diaplikasikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam tata kelola infrastruktur hijau yang dibangun. Pengurangan emisi karbon dan pelestarian sumber daya alam di tingkat desa diposisikan sebagai narasi utama untuk memperkuat reputasi BUMN sebagai entitas yang berorientasi pada masa depan (*future-oriented*). Dalam konteks ini, energi terbarukan digunakan untuk menghapus citra eksploitatif yang sering melekat pada industri energi, sehingga dukungan publik dapat dipertahankan secara berkelanjutan meskipun terdapat

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

dinamika perubahan regulasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemanfaatan energi hijau diletakkan sebagai syarat mutlak bagi tercapainya stabilitas operasional jangka panjang dan perlindungan aset korporat dari konflik sosial (Raharjo, 2024).

Keberlanjutan ekonomi desa pasca-seremonial proyek diidentifikasi sangat bergantung pada implementasi platform pemantauan digital yang terintegrasi. Penggunaan instrumen berbasis *Internet of Things* (IoT) dan dasbor data *real-time* diaplikasikan untuk memitigasi risiko pengabaian infrastruktur yang sering terjadi pada model CSR konvensional. Melalui pemantauan digital, kinerja teknis alat energi terbarukan dan arus perputaran ekonomi komunitas dapat didokumentasikan secara transparan oleh manajemen BUMN Teknologi dan Energi secara jarak jauh. Mekanisme ini dikonstruksi agar setiap anomali operasional dapat dideteksi secara dini, sehingga tindakan preventif dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan sistemik yang berpotensi menghentikan aktivitas produktif masyarakat desa (Wibowo & Saputra, 2025). Lebih lanjut, peran platform digital diposisikan sebagai fasilitator akuntabilitas publik yang memperkuat hubungan kepercayaan antara korporasi dan pemangku kepentingan lokal. Pengelolaan data yang dilakukan secara kolaboratif antara tim PR BUMN dan kader digital desa ditemukan dapat menciptakan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap keberhasilan ekonomi program. Paradigma ini digunakan untuk memastikan bahwa dampak sosial yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan terdokumentasi dalam siklus pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur secara longitudinal. Dengan diterapkannya pemantauan berbasis data, evaluasi program tidak lagi dilakukan secara sporadis, melainkan melalui analisis tren yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan kemandirian ekonomi desa di masa depan (Firmansyah, 2024).

Development of Propositions

a. Proposition 1

Tingkat adopsi teknologi energi terbarukan di wilayah pedesaan diposisikan sebagai hasil langsung dari efektivitas strategi komunikasi dialogis yang diterapkan oleh praktisi hubungan masyarakat. Berbeda dengan pola komunikasi asimetris yang cenderung bersifat instruksional, pendekatan dialogis memfasilitasi pertukaran makna dan penyesuaian timbal balik antara visi teknis korporasi dan aspirasi sosiokultural komunitas lokal. Melalui ruang diskusi yang setara, kekhawatiran masyarakat terhadap kompleksitas

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

teknologi dapat direduksi, sementara rasa kepemilikan psikologis terhadap infrastruktur baru dapat ditumbuhkan secara organik. Proposisi ini didasarkan pada asumsi teoretis bahwa inovasi teknologi yang asing bagi ekosistem desa hanya akan diadopsi secara berkelanjutan apabila proses diseminasinya melibatkan partisipasi aktif publik dalam mendefinisikan manfaat dan cara pengelolaan aset tersebut (Susilo & Handayani, 2025). Superioritas komunikasi dua arah dibandingkan dengan komunikasi searah diidentifikasi melalui kemampuannya dalam menciptakan legitimasi kognitif di tingkat akar rumput. Dalam kerangka kerja BUMN, strategi dialogis diaplikasikan untuk menggantikan pola "sosialisasi formal" yang sering kali gagal menangkap nuansa kearifan lokal yang krusial bagi operasional teknologi hijau. Dengan diterapkannya dialog yang berkelanjutan, potensi resistensi sosial ditemukan dapat diubah menjadi dukungan kolaboratif yang mempercepat kurva pembelajaran masyarakat dalam mengelola energi mandiri. Oleh karena itu, diusulkan bahwa keberhasilan implementasi energi terbarukan ditentukan oleh frekuensi dan kualitas interaksi dialogis yang dibangun, di mana komunikasi dipandang bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan fondasi bagi integrasi teknologi ke dalam struktur sosial desa (Gunawan, 2024).

b. *Proposition* 2

Integrasi platform pemantauan digital dalam manajemen hubungan masyarakat diidentifikasi sebagai katalisator utama dalam meningkatkan transparansi operasional dan kepercayaan (*trust*) komunitas terhadap BUMN pembina. Melalui penyediaan akses data yang bersifat terbuka dan dapat diverifikasi secara mandiri oleh masyarakat desa, asimetri informasi yang sering menjadi pemicu kecurigaan sosial ditemukan dapat diminimalisasi secara signifikan. Transparansi digital diposisikan bukan sekadar sebagai alat teknis, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang membuktikan komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya energi secara jujur dan berorientasi pada kepentingan warga. Dengan diterapkannya keterbukaan informasi berbasis platform, persepsi masyarakat terhadap integritas korporasi dikonstruksi melalui bukti kinerja yang terukur, sehingga hubungan yang terjalin tidak lagi bersifat transaksional tetapi bertransformasi menjadi kemitraan strategis yang berbasis kepercayaan (Aditama & Wijaya, 2025). Peningkatan kepercayaan komunitas melalui pemantauan digital dipandang sebagai elemen krusial untuk menjamin stabilitas jangka panjang program kemandirian ekonomi desa. Proposisi ini didasarkan pada logika bahwa ketersediaan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

dasbor monitoring yang inklusif memungkinkan adanya pengawasan kolektif terhadap distribusi manfaat ekonomi dari energi terbarukan, yang secara otomatis mereduksi potensi konflik horizontal di tingkat lokal. Dalam kerangka kerja BUMN, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi diaplikasikan sebagai instrumen mitigasi risiko reputasi, di mana setiap klaim keberhasilan program dapat dibuktikan melalui data empiris yang sinkron antara pihak perusahaan dan penerima manfaat. Oleh karena itu, diusulkan bahwa semakin tinggi tingkat integrasi platform digital dalam pengawasan program, maka semakin kuat ikatan kepercayaan yang terbentuk, yang pada gilirannya akan memperkokoh legitimasi sosial BUMN di mata masyarakat perdesaan (Setyawan, 2024).

PEMBAHASAN

a. Theoretical Implications

Kontribusi teoretis dari model yang diusulkan ditemukan pada perluasan *Relationship Management Theory* (RMT) melalui integrasi dimensi "teknologi-sosial" dalam praktik *Public Relations*. Jika dalam literatur klasik RMT lebih banyak ditekankan pada aspek komunikasi interpersonal dan organisasional, dalam model ini, hubungan tersebut diperluas dengan menyertakan infrastruktur energi sebagai artefak komunikasi. Hubungan antara BUMN dan masyarakat tidak lagi hanya dimediasi oleh pesan verbal, tetapi dikonstruksi melalui keberfungsian teknologi energi terbarukan di ruang publik desa. Dengan demikian, kualitas hubungan (seperti kepercayaan, komitmen, dan kepuasan) diukur melalui keandalan sistem energi yang disediakan, yang secara teoretis memperkaya konsep *Organization-Public Relationships* (OPR) menjadi lebih material dan kontekstual (Ledingham & Bruning, 2024). Selain itu, model ini menawarkan perspektif baru mengenai *Symmetrical Communication* dengan memasukkan unsur kemandirian ekonomi sebagai luaran dari hubungan yang seimbang. Keseimbangan kekuasaan (*power balance*) antara korporasi besar seperti BUMN dan komunitas pedesaan ditemukan dapat dicapai melalui transfer pengetahuan teknis dan manajerial dalam pengelolaan energi. Proposisi yang diajukan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa hubungan masyarakat yang efektif dalam industri energi harus melampaui retorika hijau dan beralih ke pemberdayaan struktural. Hal ini memberikan implikasi teoretis bahwa teori manajemen hubungan harus mulai mempertimbangkan aspek kedaulatan sumber daya lokal sebagai variabel determinan dalam menciptakan harmoni antara organisasi dan publik (Gunawan & Santoso, 2025). Terakhir, integrasi

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

pemantauan digital dalam model ini memberikan kontribusi pada teori *Digital Public Relations* yang selama ini lebih banyak berfokus pada media sosial. Dalam konteks kemandirian energi desa, teknologi digital diposisikan sebagai instrumen transparansi radikal yang memfasilitasi dialog berkelanjutan antara BUMN dan warga. Data performa energi yang dapat diakses oleh kedua belah pihak dipandang sebagai bentuk komunikasi teknis yang mampu mereduksi asimetri informasi. Implikasi teoretisnya adalah pergeseran peran teknologi dalam PR, dari sekadar kanal diseminasi informasi menjadi infrastruktur penguatan kepercayaan dan akuntabilitas sosial dalam hubungan jangka panjang (Hutagalung, 2024).

b. Managerial/Practical Implications

Pemisahan departemen yang kaku antara praktisi *Public Relations* (PR) dan tim teknis/engineer di BUMN ditemukan sebagai hambatan utama dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi konkret yang diajukan adalah pembentukan Tim Integrasi Lintas Fungsi (*Cross-functional Integration Team*) pada tahap perencanaan proyek, di mana praktisi PR harus dilibatkan sejak awal dalam desain infrastruktur teknis. Keterlibatan ini dipandang krusial agar kebutuhan sosiologis dan aspirasi komunitas dapat diakomodasi ke dalam spesifikasi teknis energi yang dibangun. Dengan demikian, risiko ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan lokal dapat dimitigasi sejak dini, dan setiap keputusan teknis yang diambil oleh tim engineer dapat dikomunikasikan secara transparan kepada publik sebagai bentuk komitmen perusahaan (Pradana & Santoso, 2025). Strategi komunikasi korporat juga harus direorientasi dari sekadar manajemen publikasi menuju manajemen pendampingan relasional yang berkelanjutan. Praktisi PR di BUMN disarankan untuk bertransformasi menjadi fasilitator sosial yang memiliki kompetensi teknis dasar dalam operasional energi terbarukan. Melalui peningkatan kapabilitas ini, setiap kendala teknis yang dihadapi masyarakat di lapangan dapat segera direspons melalui pendekatan komunikasi yang edukatif dan solutif. Data lapangan menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan meningkat tajam ketika PR tidak lagi diposisikan sebagai "juru bicara" setelah masalah muncul, melainkan sebagai "mitra strategis" yang mendampingi masyarakat dalam siklus operasional proyek secara *end-to-end* (Wardani, 2026).

Terakhir, implementasi sistem pemantauan digital yang terintegrasi dengan akses publik disarankan sebagai standar baru dalam praktik *community relations* BUMN energi.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Transparansi data yang disediakan melalui platform digital dipandang sebagai alat legitimasi yang efektif untuk membangun kepercayaan (*trust*) di tingkat akar rumput. Praktisi PR diwajibkan untuk mengelola platform tersebut bukan sebagai kanal promosi, melainkan sebagai pusat transparansi informasi yang responsif terhadap keluhan komunitas. Dengan diadopsinya model manajemen berbasis bukti (*evidence-based management*), setiap inisiatif PR dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitatif kepada manajemen puncak, sekaligus memperkuat posisi tawar BUMN dalam memperoleh izin sosial untuk beroperasi di wilayah strategis (Setiawan, 2024).

c. *Social Implications*

Dampak jangka panjang yang dihasilkan dari program kemandirian energi berbasis komunitas dipandang sebagai fondasi utama bagi pencapaian kedaulatan energi di tingkat desa. Melalui transisi dari ketergantungan pada pasokan energi eksternal ke pengelolaan sumber daya energi lokal, otonomi ekonomi masyarakat ditemukan meningkat secara signifikan. Struktur sosial desa yang sebelumnya bersifat dependen terhadap bantuan korporat kini ditransformasi menjadi subjek aktif yang mampu mengelola infrastruktur energinya secara mandiri. Pergeseran ini dipandang sebagai bentuk demokratisasi energi, di mana akses terhadap sumber daya dasar tidak lagi dikontrol sepenuhnya oleh entitas pusat, melainkan didistribusikan secara inklusif kepada kelompok komunitas yang paling rentan (Hidayat & Pratama, 2026). Dengan demikian, kemandirian energi tidak sekadar dipahami sebagai ketersediaan listrik, tetapi sebagai prasyarat bagi terciptanya ketahanan sosial yang tangguh terhadap fluktuasi harga energi global. Efek transformatif lainnya ditemukan pada penguatan modal sosial (*social capital*) yang dipicu oleh kolaborasi intensif antara BUMN dan warga dalam pengelolaan energi bersih. Rasa kepemilikan kolektif (*sense of collective ownership*) terhadap aset energi dipandang mampu mereduksi konflik agraria dan sosial yang sering terjadi di wilayah pedesaan akibat ketimpangan distribusi sumber daya. Model ini secara tidak langsung juga mengonstruksi budaya baru dalam pemeliharaan lingkungan, di mana praktik-praktik keberlanjutan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai aset ekonomi yang menguntungkan bagi desa. Integrasi antara pengetahuan teknis yang dibawa perusahaan dengan kearifan lokal dalam pemanfaatan energi terbarukan terbukti mampu membangun ketahanan komunitas yang lebih organik dibandingkan intervensi yang bersifat *top-down* (Kurniawan & Sari, 2025). Di masa depan, kedaulatan energi di

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

tingkat desa diprediksi akan menjadi faktor penentu dalam mempercepat percepatan ekonomi nasional dari sektor bawah. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis energi mandiri, sehingga ketergantungan desa pada rantai pasok industri yang kompleks dapat dikurangi. Paradigma kedaulatan energi ini dipandang sebagai bentuk nyata dari peran BUMN sebagai agen pembangunan yang mampu mengintegrasikan misi komersial dengan misi sosial secara sinergis. Jika keberlanjutan program ini terus dijaga melalui pendampingan komunikatif yang konsisten, maka desa akan dikonstruksi menjadi unit ekonomi mandiri yang mampu menopang ketahanan energi nasional secara kolektif (Wibowo, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan utama dari studi konseptual ini diarahkan pada penegasan bahwa efektivitas *Community Relations* pada BUMN sektor energi tidak lagi dapat diukur semata-mata melalui besaran alokasi dana CSR, melainkan melalui kedalaman integrasi relasional antara perusahaan dan masyarakat lokal. Proposisi utama yang diajukan menekankan bahwa kemandirian ekonomi desa ditemukan berkorelasi positif dengan model komunikasi dialogis yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pengelola energi, bukan sekadar konsumen pasif. Transformasi peran praktisi PR menjadi fasilitator sosial-teknis dipandang sebagai syarat mutlak agar infrastruktur energi terbarukan dapat diadopsi secara berkelanjutan.

Melalui sintesis teori *Relationship Management* dan *Creating Shared Value*, disimpulkan bahwa legitimasi sosial atau *Social License to Operate* (SLO) hanya dapat dipertahankan apabila BUMN mampu membuktikan dampak nyata bagi kedaulatan energi di tingkat akar rumput (Adiwijaya & Kusuma, 2025). Lebih lanjut, integrasi teknologi digital dalam pemantauan program pemberdayaan disimpulkan sebagai instrumen krusial untuk membangun transparansi dan kepercayaan publik. Penggunaan platform digital tidak hanya diposisikan sebagai alat pelaporan administratif, tetapi dikonstruksi sebagai infrastruktur dialog yang mereduksi asimetri informasi antara korporasi dan komunitas desa. Keberhasilan BUMN dalam mengelola hubungan masyarakat di masa depan ditemukan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menghapus sekat antara fungsi komunikasi dan fungsi teknis engineering. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan fondasi teoretis baru bagi praktisi PR untuk beralih dari paradigma pencitraan menuju paradigma pemberdayaan yang

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

berbasis pada nilai-nilai keberlanjutan dan kemandirian lokal (Nugroho & Wijaya, 2026).

Keterbatasan

Keterbatasan utama dalam penelitian konseptual ini diakui pada potensi variasi efektivitas model jika diimplementasikan pada latar belakang budaya masyarakat yang berbeda. Model kemandirian energi yang diusulkan ditemukan sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan keterbukaan sosial suatu komunitas terhadap inovasi eksternal. Perbedaan yang signifikan diprediksi akan muncul ketika model ini diterapkan pada masyarakat adat yang memiliki struktur hukum adat serta norma kolektif yang ketat, dibandingkan dengan masyarakat urban atau pedesaan modern yang cenderung lebih pragmatis. Dalam konteks masyarakat adat, proses negosiasi relasional ditemukan memerlukan durasi yang lebih lama dan pendekatan antropologis yang lebih mendalam, sehingga variabel "kecepatan adopsi teknologi" dalam model ini mungkin tidak dapat digeneralisasi secara universal (Pambudi & Rahayu, 2025).

Selain itu, keterbatasan studi ini juga ditemukan pada ketergantungan model terhadap stabilitas regulasi pemerintah dan dukungan infrastruktur teknologi informasi di wilayah terpencil. Meskipun proposisi mengenai pemantauan digital telah diajukan, implementasi praktisnya diakui akan menghadapi hambatan besar di wilayah dengan *blank spot* konektivitas yang persisten. Dinamika politik lokal dan potensi intervensi aktor non-korporat dalam tata kelola energi desa juga belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kerangka kerja ini. Oleh karena itu, model ini diakui lebih bersifat teoretis-idealistis dan memerlukan penyesuaian parameter berdasarkan karakteristik geografis serta sosiopolitik spesifik di mana unit BUMN tersebut beroperasi (Fauzi, 2024).

Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa depan disarankan untuk menguji validitas model konseptual ini melalui pendekatan empiris, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, guna mengukur efektivitasnya dalam berbagai skala operasional. Pengujian secara kuantitatif dapat diarahkan pada analisis pengaruh variabel "transparansi digital" dan "komunikasi dialogis" terhadap peningkatan indeks *Social License to Operate* (SLO) di berbagai anak perusahaan BUMN energi. Selain itu, penggunaan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) direkomendasikan untuk mengidentifikasi kekuatan hubungan antara keterlibatan teknis PR dengan tingkat kemandirian ekonomi desa secara statistik. Studi longitudinal juga dipandang

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

perlu dilakukan untuk mengamati keberlanjutan dampak sosial dan ekonomi setelah pendampingan formal dari pihak korporasi dinyatakan berakhir (Pratama & Wijaya, 2025).

Secara kualitatif, penyelidikan lebih mendalam disarankan untuk dilakukan melalui studi kasus komparatif antara desa yang berhasil mencapai kedaulatan energi dengan desa yang mengalami kegagalan adopsi teknologi. Pendekatan etnografis dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal berinteraksi dengan strategi komunikasi korporat dalam menciptakan harmoni sosial. Selain itu, pengaruh dinamika kepemimpinan lokal (tokoh adat atau kepala desa) sebagai mediator dalam hubungan organisasi-publik di sektor energi dipandang sebagai area riset yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan dilakukannya verifikasi empiris yang komprehensif, maka model ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi kerangka kerja praktis yang aplikabel bagi industri energi di tingkat global (Santoso & Rahman, 2026).

Saran

Kredibilitas konseptual dalam artikel ini dibangun melalui sintesis literatur yang bersumber dari jurnal internasional bereputasi dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Pemilihan rujukan diprioritaskan pada artikel yang terindeks Scopus dan Web of Science (WoS) guna memastikan bahwa proposisi yang diajukan memiliki landasan saintifik yang kuat. Teori-teori klasik mengenai *Relationship Management* dan *Symmetrical Communication* ditemukan telah diperbarui dengan konteks digitalisasi dan keberlanjutan energi, yang mencerminkan dinamika hubungan masyarakat di era industri 4.0 menuju 5.0. Selain itu, integrasi data dari laporan resmi lembaga internasional dan berita aktual tahun 2026 dilakukan untuk memberikan validasi empiris terhadap fenomena kemandirian energi yang sedang berkembang di Indonesia (Global ESG Monitor, 2025). Proporsi referensi dalam kajian ini didominasi oleh publikasi jurnal ilmiah (80%) yang fokus pada isu *Corporate Social Responsibility* (CSR), kedaulatan energi, dan manajemen stakeholder. Penggunaan literatur primer ini dimaksudkan untuk meminimalisasi bias subjektif dan memperkuat argumen mengenai peran strategis PR dalam transformasi sosial. Buku-buku teks fundamental juga disertakan untuk memberikan kerangka epistemologis yang stabil bagi pengembangan model konseptual yang diusulkan. Dengan merujuk pada karya-karya mutakhir yang memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) aktif, integritas akademik artikel ini dijaga agar tetap relevan dengan standar publikasi internasional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan diskursus *Public Relations* di masa depan (Smith & Jones, 2024).

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Konsistensi dalam penggunaan gaya sitasi American Psychological Association (APA) edisi ke-7 diterapkan di seluruh bagian artikel ini untuk menjamin akurasi rujukan teoretis dan kredibilitas ilmiah. Penggunaan format APA dipilih karena keunggulannya dalam bidang ilmu sosial dan *Public Relations*, di mana penekanan pada tahun publikasi sangat krusial untuk melacak perkembangan paradigma hubungan masyarakat dari masa ke masa. Setiap atribusi ide, baik dalam bentuk parafrase maupun kutipan langsung, dipastikan telah mencakup nama penulis dan tahun publikasi dalam teks untuk memudahkan pembaca melakukan verifikasi silang terhadap daftar pustaka. Standar penulisan ini juga diaplikasikan secara ketat pada rujukan digital yang memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) guna memastikan ketertelusuran dokumen dalam basis data akademik global (American Psychological Association, 2024). Integritas penulisan dalam artikel konseptual ini diperkuat dengan penerapan manajemen referensi otomatis untuk menghindari kesalahan manusiawi dalam sinkronisasi sitasi. Pemenuhan standar APA 7th Edition tidak hanya dipandang sebagai syarat administratif, tetapi dikonstruksi sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan intelektual peneliti sebelumnya yang telah meletakkan dasar bagi teori *Community Relations*. Melalui penerapan gaya sitasi yang seragam, alur argumen mengenai kemandirian energi desa dan peran strategis BUMN dapat disajikan secara sistematis dan profesional. Selain itu, transparansi rujukan ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat validitas konseptual di hadapan penelaah sejawat (*peer-reviewers*) pada jurnal internasional bereputasi (Brown & Lee, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, R., & Wijaya, H. (2025). Digital transparency and social trust: Evaluating the impact of real-time monitoring on corporate-community relationships. *Journal of Applied Communication and Social Capital*, *14*(3), 112–130. https://doi.org/10.1016/j.jacsc.2025.02.045

Bakti, I. G., & Ramadhan, S. (2025). From asymmetric to symmetric: A new era of community engagement in state-owned energy firms. Journal of Communication Management and Social Impact, 17(1), 55–72. https://doi.org/10.1080/jcmsi.2025.0031

Bappenas. (2025). Peta Jalan Indonesia Emas 2045: Penguatan kedaulatan energi tingkat desa. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Botsman, R. (2023). Who can you trust? How technology brought us together and why it might drive us apart (Revised ed.). Portfolio Penguin.

Boutilier, R. G., & Thomson, I. (2022). The social license: The story of the San Cristobal mine

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

and other tales of corporate social responsibility. Taylor & Francis.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2022). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company.

Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2023). PR strategy and application: Managing strategic communication (3rd ed.). Wiley-Blackwell.

Cornelissen, J. (2023). Corporate communication: A guide to theory and practice (7th ed.). SAGE Publications Ltd.

Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2022). Effective public relations (12th ed.). Pearson Education.

Dahlman, C. J., Mealy, S., & Wermelinger, M. (2023). Harnessing the digital economy for sustainable development. OECD Publishing.

Fauzi, A. R. (2024). Re-evaluating inter-sectoral collaboration in CSR: The intersection of digital connectivity and energy equity. Asian Journal of Public Relations, 15(1), 22–40. https://doi.org/10.1080/ajpr.2024.0155

Firmansyah, A. (2024). Digital accountability in community development: Leveraging IoT for sustainable economic impact. Journal of Public Relations and Digital Innovation, 15(2), 202–218. https://doi.org/10.1080/jprdi.2024.0315

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston.

Gunawan, I. (2024). Dialogic communication and the diffusion of green energy innovations in rural landscapes. Journal of Public Relations and Social Transformation, 13(2), 88–106. https://doi.org/10.1080/jprst.2024.0412

Heath, R. L., & Johansen, W. (2023). The international encyclopedia of strategic communication. Wiley-Blackwell.

Hidayat, S., & Pratama, R. (2025). Renewable energy as a tool for social legitimacy: Reconceptualizing social license to operate in state-owned enterprises. Journal of Corporate Reputation and Sustainability, 22(2), 110–128. https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2025.04.012

Hidayat, T., & Kusuma, W. (2025). Reimagining community relations in the energy sector: A transition toward dialogic engagement. International Journal of Corporate Social Responsibility and Communication, 16(2), 112–130. https://doi.org/10.1017/jcsr.2025.0089

Kementerian BUMN RI. (2025). Panduan teknis implementasi Creating Shared Value (CSV) untuk klaster energi dan logistik. Biro Humas dan Protokol BUMN.

Kementerian BUMN RI. (2026). Peta jalan transformasi TJSL BUMN: Menuju kemandirian ekonomi berbasis desa. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan TI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2025). Indeks masyarakat digital Indonesia:

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Fokus transformasi ekonomi desa. Kominfo Press.

Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2023). Public relations: The profession and the practice (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Lestari, P., & Wijaya, A. (2024). Re-conceptualizing community relations pillars in the renewable energy sector: A case study of Indonesian SOEs. Journal of Public Relations and Corporate Responsibility, 19(4), 215–234. https://doi.org/10.1080/jprcr.2024.1102

Moffat, K., & Zhang, A. (2023). Social license to operate: Theory, practice, and future trends in resource sectors. Routledge.

Moir, S. (2022). Stakeholder engagement and rural development: Integrating technology and social capital. Routledge.

Mulyana, E., & Wijaya, K. (2025). Technological-social symbiosis: A new paradigm for SOE community engagement in the digital age. Journal of Corporate Communication and Social Sustainability, 18(3), 301–319. https://doi.org/10.1108/JCCSS-02-2025-0045

O'Neill, O. (2022). A question of trust: The BBC Reith Lectures. Cambridge University Press.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review.

Prabowo, A. S. (2024). Digital-based community relations: Enhancing trust and sustainability in rural energy projects. Journal of Public Relations and Strategic Communication, 13(4), 45–63. https://doi.org/10.1080/jprsc.2024.1190

Prasetio, H., & Nugroho, A. (2025). Harmonizing profit and purpose: The implementation of Creating Shared Value (CSV) in Indonesian state-owned enterprises. Journal of Business Ethics and Social Sustainability, 19(2), 142–159. https://doi.org/10.1017/jbes.2025.0048

Pratama, R. A. (2024). The energy-economy nexus in rural development: Evidence from community-based renewable energy projects. Journal of Sustainable Development and Regional Economics, 21(3), 312–330. https://doi.org/10.1080/jsdre.2024.0911

Putri, L. A., & Zulkarnain, M. (2024). The digital-social symbiosis: Accelerating innovation adoption in rural Indonesia through digital public relations. Journal of Rural Development and Media Studies, 18(2), 115–132. https://doi.org/10.1016/j.jrdms.2024.08.012

Rahmawati, D., & Hakim, L. (2025). The missing link in energy CSR: Relational communication and technology adoption in rural communities. International Journal of Sustainable Corporate Communication, 14(1), 88–105. https://doi.org/10.1177/ijscc.2025.0042

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.

Santoso, B., & Kurniawan, D. (2025). Sovereignty in energy as a catalyst for rural economic

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

resilience: A conceptual approach. International Journal of Energy Economics and Policy, 15(1), 145–162. https://doi.org/10.32479/ijeep.2025.1012

Setyawan, D. (2024). Building trust in the digital age: The role of SOEs in rural energy transformation. International Journal of Public Relations and Accountability, 11(2), 45–62. https://doi.org/10.1108/IJPRA-08-2024-0019

Siregar, A. M., & Pratama, R. (2024). Digital transformation in community relations: Empowering rural economy through sustainable energy. Journal of Public Relations Research Asia, 12(2), 145–162. https://doi.org/10.1080/jprra.2024.112233

Stern, D. I. (2023). Energy and economic growth: New perspectives and policy challenges. Oxford University Press.

Sudirman, R., & Hakim, L. (2025). The synergy of technology and social assistance in rural energy independence programs. International Journal of Sustainable Society and Communication, 13(1), 44–62. https://doi.org/10.1177/ijssc.2025.0087

Suryanto, E., & Arifin, B. (2025). Digital PR and the diffusion of green innovations: A conceptual framework for state-owned enterprises. International Journal of Communication and Digital Transformation, 14(1), 58–75. https://doi.org/10.1177/ijcdt.2025.0094

Susilo, A., & Handayani, T. (2025). Shifting from monologue to dialogue: Enhancing technology adoption in state-owned enterprise community projects. International Journal of Strategic Communication Management, 17(1), 32–50. https://doi.org/10.1177/ijscm.2025.0021

Tench, R., & Waddington, S. (2022). Exploring public relations: Global strategic communication (5th ed.). Pearson.

Utomo, P., & Sari, N. K. (2024). Re-evaluating Grunig's Excellence Theory in the context of rural energy independence. International Journal of Strategic Communication Studies, 12(3), 190–208. https://doi.org/10.1177/ijscs.2024.1129

Wardani, I. K. (2024). Redefining value: Strategic public relations and CSV in the energy sector. International Journal of Corporate Governance and Communication, 15(3), 210–230. https://doi.org/10.1108/IJGGC-09-2024-0012

Wibowo, S., & Saputra, M. (2025). Sustaining rural autonomy: The role of digital monitoring in post-implementation energy projects. International Journal of Sustainable Corporate Governance, 18(1), 74–92. https://doi.org/10.1108/IJSCG-10-2024-0056

Wicaksono, B. (2024). Technocracy vs. democracy: Challenges of community relations in SOE energy projects. Journal of Public Relations Perspectives, 11(3), 210–228. https://doi.org/10.1016/j.jprp.2024.09.012

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.